

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Runtuhnya orde baru membuka peluang bagi reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman orde baru telah mengajarkan bangsa Indonesia bahwa pelanggaran demokrasi akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi negara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia telah sepakat untuk melakukan demokratisasi kembali, proses demokratisasi sistem politik Indonesia untuk memungkinkan terbentuknya kebebasan nasional, pelaksanaan kedaulatan nasional, dan pengawasan eksekutif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Budiardjo, 2013).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan simbol dan tolak ukur demokrasi bagi banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi atau demokratis. Pemilu dan hasilnya mencerminkan suasana terbuka dan penerapan nilai-nilai dasar demokrasi, serta kebutuhan akan ekspresi dan kebebasan berserikat, yang disebut refleksi dalam suara rakyat (Hadiwijoyo, 2012). Hal ini karena pemilu dapat menghasilkan perwakilan aspirasi warga negara, yang tentunya erat kaitannya dengan penggunaan legitimasi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi menjadi sistem yang menjamin kebebasan warga negara dan diwujudkan dengan pemungutan suara dalam bentuk partisipasi publik (Hadiwijoyo, 2012). Pemilu juga memiliki istilah lain yang merupakan simbol kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, rakyat memiliki kekuatan terbesar di negara ini.

Analisis kebijakan terbaru menunjukkan bahwa partisipasi politik

merupakan isu penting, dan banyak penelitian telah dilakukan baru-baru ini, terutama mengenai hubungan dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya kajian tentang partisipasi politik terfokus pada partai politik sebagai subjek utama, namun dengan berkembangnya demokrasi, banyak bermunculan sekelompok orang yang ingin mengusulkan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk melalui pemilihan kepala negara dan pengaruhnya langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah (Hadiwijoyo, 2012). Kegiatan tersebut meliputi pemungutan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menghubungi dan melobi pejabat pemerintah dan anggota parlemen, dan berpartisipasi dalam partai politik dan gerakan sosial melalui tindakan langsung.

Di beberapa negara demokrasi, konsep partisipasi politik dilakukan melalui upaya bersama untuk menentukan tujuan dan masa depan warga negara dan mereka yang ingin mengambil inisiatif, dengan definisi yang sama bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat meningkat. Partisipasi politik adalah perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, seperti melalui pemungutan suara dan kegiatan lainnya, dimotivasi oleh keyakinan bahwa kegiatan bersama ini mengarah pada kepentingan warga atau memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang mengikat (Chilcote, 2007). Dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa aktivitasnya memiliki pengaruh politik (*Political Effectiveness*).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik erat kaitannya dengan pemahaman politik, karena kepentingan warga negara dilindungi

oleh partisipasi publik dalam hak memilih. Di negara demokrasi lain, ada keyakinan bahwa semakin banyak orang akan berpartisipasi dan semakin baik mereka. Dalam hal ini, tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sedang menyelidiki dan menguasai isu-isu politik dan siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi biasanya dimaknai sebagai kualitas yang buruk, karena banyak yang bisa diartikan tidak memperhatikan masalah pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak akan banyak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat jika perbedaan pendapat tidak diungkapkan dalam masyarakat, melainkan untuk kepentingan kelompok kecil. Partisipasi yang rendah umumnya dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah (Budiardjo, 2013).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilu, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam analisis politik terbaru partisipasi politik adalah persoalan yang krusial, dan akhir-akhir ini banyak dikaji terutama di negara berkembang yang mengalami penurunan partisipasi politik. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik menjadi pelaku utama. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, masalah praktik demokrasi banyak timbul dari kalangan rakyat yang berpengetahuan rendah sehingga kurang sadar politik

(Budiardjo, 2013).

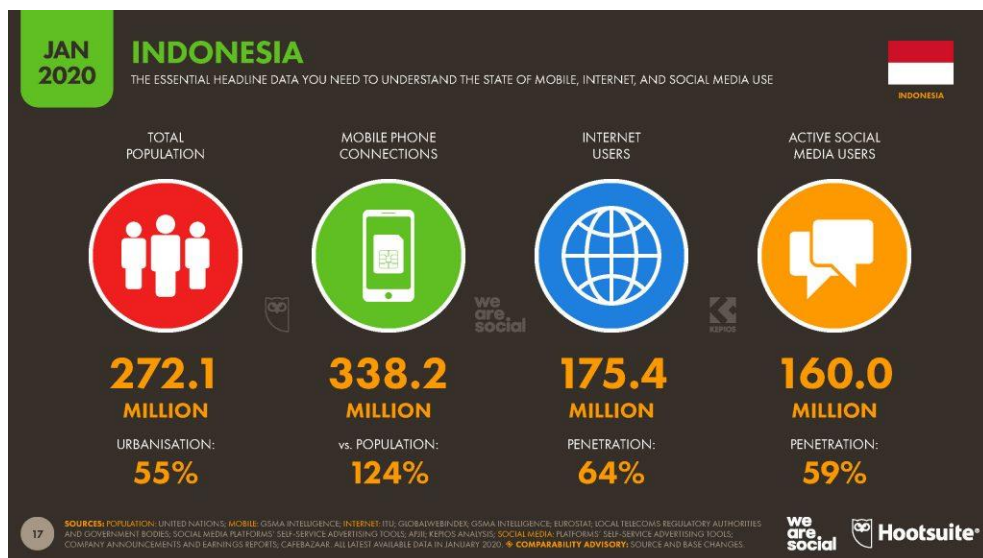
Partisipasi politik merupakan gerakan seseorang atau sekelompok orang untuk terlibat secara efektif dan aktif dengan isu-isu kebangsaan, antara lain dengan memilih unsur pemerintahan pada tingkat yang berbeda dan secara langsung atau dengan implikasi yang berdampak pada program dan kinerja pemerintah (*public policy*). Aktivitas ini mencakup kegiatan seperti implementasi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, pergi untuk bermusyawarah, menjalin hubungan (*connecting*) atau berkampanye dengan otoritas atau individu dari parlemen, menjadi anggota dari partai atau salah satu organisasi sosial dengan aktivitas langsung (Hadiwijoyo, 2012).

Partisipasi politik ini juga menjadi fokus utama bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk meningkatkan keterpilihannya di Pemilu kepala daerah (Pilkada). Paslon kepala daerah menggunakan berbagai strategi komunikasi politik dalam kampanye untuk menarik perhatian dan mensugesti para pemilih (Utomo, 2013). Komunikasi politik merupakan suatu proses yang kompleks yang di dalamnya terdapat upaya-upaya dan strategi-strategi komprehensif dalam mempengaruhi pemilih sehingga meningkatkan keberhasilan tujuan politik seorang politisi (Ahmad, 2012). Komunikasi politik menjadi faktor penentu politisi, dalam hal ini paslon kepala daerah, untuk mengkomunikasikan ideologi, gagasan, rencana program, kebijakan, keberpihakan, dan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap dirinya (Nanda, 2018).

Di era digital seperti saat ini, internet menjadi sarana yang sangat efektif dalam komunikasi politik terutama di masa kampanye. *Smartphone* dan jaringan internet merupakan dua perangkat yang menjadi media komunikasi antara politisi

(paslok kepala daerah) dengan masyarakat melalui pengoperasian aplikasi media sosial (Fadly, 2015). Media sosial medupakan media digital yang digunakan masyarakat umum untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya. Oleh karena itu, penggunaan media sosial telah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat sehingga sangat relevan menjadi media komunikasi politik selama pemilu.

**Gambar 1.1 Data Penggunaan Internet dan Media Sosial di Indonesia**

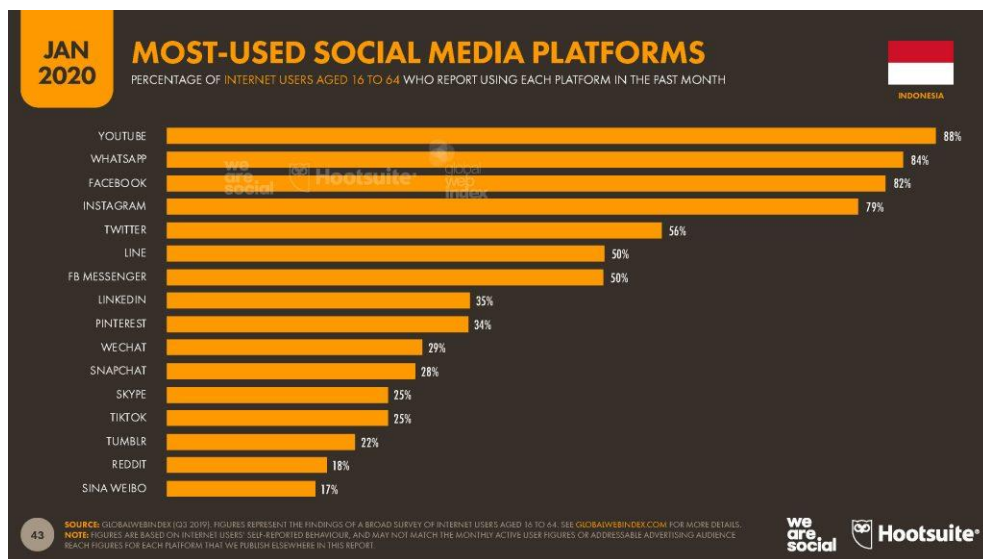


Sumber: Hootsuite (2020)

Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 64% atau sebanyak 175,4 juta sehingga keterjangkauan jaringan internet menyebar merata. Angka statistik ini lebih mencengangkan lagi jika meninjau jumlah perangkat yang tersambung atau terhubung dengan internet. Pasalnya, menurut Hootsuite (2020) terdapat 338,2 juta perangkat tersambung internet atau 124% dari total populasi penduduk Indonesia. Sedangkan, jika dibandingkan dengan pengguna internet maka perangkat yang tersambung internet hampir mencapai 2 kali lipat. Artinya, setiap orang memiliki 1

hingga 2 perangkat yang digunakan dan tersambung dengan internet, misalnya *handphone* dan laptop, komputer, atau *tablet*.

**Gambar 1.2 Data Media Sosial Yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia**

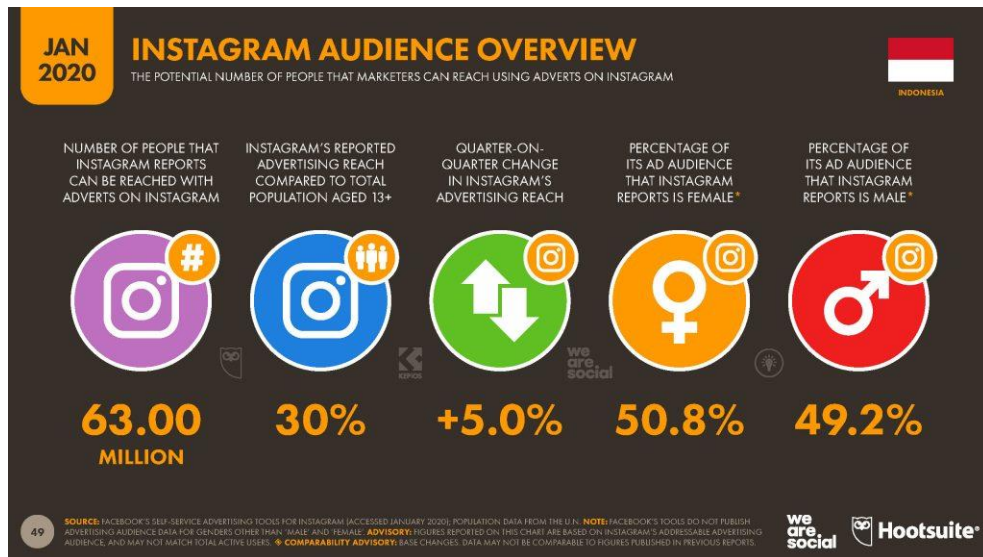


Sumber: Hootsuite (2020)

Gambar 1.1 juga menunjukkan bahwa pengguna internet aktif bermedia sosial sebanyak 160 juta. Pada gambar 1.2 dirinci penggunaan media sosial paling banyak adalah youtube (88%), whatsapp (84%), facebook (82%), dan instagram (79%) dari total pengguna sosial media. Mengenai youtube, Hootsuite (2020) menjelaskan bahwa youtube merupakan media hiburan bagi pengguna internet yang ditunjukkan dengan penggunaan youtube untuk hiburan, belajar, dan menonton berita. Sedangkan whatsapp merupakan media sosial untuk terhubung dengan orang lain yang terbatas pada perkenalan dan pertukaran nomor whatsapp. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa youtube dan whatsapp bukan merupakan media komunikasi politik yang efektif. Disamping itu, media sosial

facebook dan instagram merupakan media sosial paling efektif dalam komunikasi politik karena dapat terhubung dengan masyarakat luas dengan berbagai fitur seperti periklanan, tayangan video, persebaran, dan konferensi.

**Gambar 1.3 Data Penggunaan Digital dan Media Sosial di Indonesia**

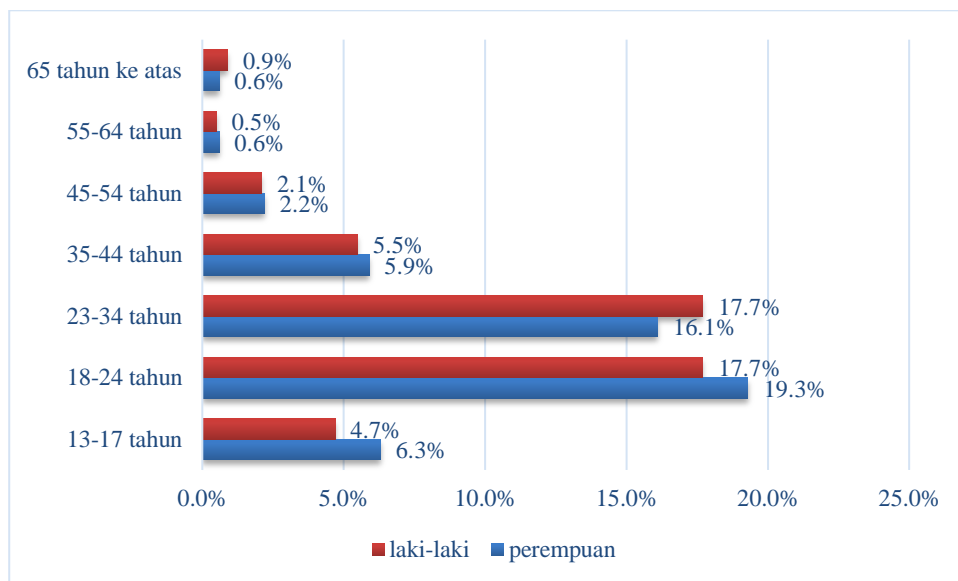


Sumber: Hootsuite (2020)

Penelitian ini memilih instagram sebagai media sosial dalam komunikasi politik dan kampanye dalam konteks peluang kemenangan pasangan calon pilkada. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu pengguna internet yang banyak yaitu 63 juta pengguna di Indonesia. Pengguna instagram yang terus meningkat 5% per tahun. Berikutnya, pengguna instagram juga dinominasi oleh masyarakat kelompok usia 13 tahun – 24 tahun atau dalam kategori pemilih sebanyak 51% (Napoleoncat, 2020). Berbeda halnya dengan facebook, mayoritas yaitu 33,6% didominasi oleh pengguna dengan kelompok usia 25 tahun – 34 tahun (Good News From Indonesia, 2021). Hal ini menyimpulkan bahwa facebook kedepan akan ditinggalkan oleh

generasi muda sedangkan instagram akan terus meningkat karena dominasi generasi muda.

**Gambar 1.4 Data Kelompok Usia Pengguna Instagram**



Sumber: Napoleoncat (2020)

Instagram sebagai sarana komunikasi politik yang efektif juga didasarkan pada alasan bahwa pengguna instagram bukan hanya regeneratif (didominasi generasi muda) akan tetapi juga pengguna kelompok usia 25 tahun – 34 tahun juga cukup banyak yaitu sebesar 33,8%. Oleh karena itu, pemilih aktif sebesar 83% dapat dijangkau melalui komunikasi politik dengan media sosial instagram. Secara jangka panjang, pengguna instagram yang masih generasi muda akan terus mendominasi seiring bertambahnya umur sehingga pengguna instagram akan semakin banyak dan berpengaruh pada proses demokrasi seperti Pilkada dan Pemilu. Penggunaan instagram dalam komunikasi politik juga dilakukan salah satunya pada perhelatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman yang



terselenggara pada 2020 lalu. Pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi dan krisis menimbulkan banyak kendala bagi KPU Daerah (KPUD).

Kendala terbesar adalah pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Sleman. Pandemi ini bahkan sempat mengakibatkan pelaksanaan Pilkada di Indonesia ditunda (CNBC Indonesia, 2020). Pilkada tersebut memang dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru dalam penyebaran wabah Covid-19, tetapi Pilkada serentak pada akhirnya berhasil digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Beberapa strategi dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kampanye media sosial yang penggunaannya meningkat selama pandemi karena sekolah dari rumah dan bekerja dari rumah (Tangkas, Muntaha, & Supadiyanto, 2022). Para paslon juga melakukan kampanye politik yang memanfaatkan media sosial. Hal ini terbukti menghasilkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sleman sangat baik di tengah-tengah wabah serta fungsi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, diuji ketangguhannya dalam membangun partisipasi politik masyarakat di masa pandemi. Indikator sangat baik ditunjukkan dari angka pemilih yang lebih besar dari pada angka golput, yakni 549.044 suara pemilih berbanding 126 suara golput (Nurgiansah, 2021).

Pilkada Kabupaten Sleman yang terselenggara pada 9 Desember 2020 digelar dengan persaingan 3 paslon bupati dan wakil bupati, yakni nomor urut 1 Raden Aguschoric, S.E., dan M.M, nomor urut 2 Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes dan Amin Purnama, S.H, dan nomor urut 3 Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo dan Danang Mahersa, S.E. Ketiga pasang calon turut serta dalam melakukan komunikasi politik dan pendidikan kewarganegaraan sehingga menekan angka golput di Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020. Hal ini didasarkan pada perolehan suara nomor urut 1 30,81%, nomor urut 2 30,56%, dan nomor urut 3 38,64%.

Persaingan antar paslon yang ketat dan perolehan suara yang tipis menjadi indikasi bahwa komunikasi politik sangat efektif dilakukan para paslon terlebih lagi tingkat golput hanya 0,02%.

Kampanye media sosial terutama instagram cukup efektif hal ini tampak pada akun masing-masing paslon yang rutin melakukan post dan story. Masing-masing paslon menggerakkan pengikut di instagram untuk meningkatkan komunikasi politik yang menyebar ke seluruh daerah Kabupaten Sleman. Akun para calon bupati efektif berkomunikasi politik melalui akun instagram pribadinya yaitu Danang Wicaksana Sulistya (@danang\_dancel), Sri Muslimatun (@srimuslimatun), dan Kustini Sri Purnomo (@kustinisripurnomo). Para Calon Bupati Sleman ini memiliki pengikut yang cukup banyak yaitu lebih dari 7 ribu, bahkan akun @kustinisripurnomo telah centang biru (terverifikasi tokoh publik) dengan pengikut lebih dari 17 ribu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa instagram merupakan salah satu media sosial yang efektif dalam melakukan komunikasi politik terlebih bagi pemilih aktif di rentang usia 17 tahun – 34 tahun.

Penelitian ini dilakukan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penjelasan mengenai alasan memilih Desa Condongcatur yaitu warga Desa Condongcatur tertama generasi sangat aktif menggunakan media sosial terutama Instagram. Dengan jumlah generasi muda sebanyak 17.797 jiwa (Desa Condongcatur, 2022). Dengan demikian bahwasanya Instagram berpengaruh dalam kemenangan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 terutama di Desa Condongcatur dengan pemilih pemula dan aktif 17 ribu lebih. Karena pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 banyak terdapat pemilih pemula (generasi milenial), yang kebanyakan aktif di media social terutama Instagram. Para

pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh golongan usia produktif, yakni pada rentan usia 18-24 tahun, atau lazim disebut generasi milenial mendominasi hingga 17.797 pengguna di Desa Condongcatur.

Dengan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Media **Sosial Instagram Terhadap Peluang PemenanganPasangan Calon Bupati Kabupaten Sleman pada Pilkada 2020 (Studi Kasus pada Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)**”. Penelitian ini berfokus pada respon masyarakat terhadap komunikasi politik yang dilakukan paslon pada Pilkada Kabupaten Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan pilihan politik lebih baik.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan agar penelitian ini dapat dikaji mendalam. Dalam skripsi ini penulis berfokus penelitian kepada masyarakat Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran media sosial instagram terhadap peluang kemenangan paslon pada Pilkada Kabupaten Sleman dengan studi kasus di Desa Condongcatur?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengetahui komunikasi politik masing-masing Calon Bupati Sleman terkait dengan intensitas, tema, dan jenis konten di instagram masing-masing Calon Bupati Sleman.
2. Mengkaji dan mengetahui respon masyarakat Desa Condongcatur terhadap konten instagram Calon Bupati Sleman.
3. Mengkaji dan mengetahui peran media sosial instagram terhadap peluang kemenangan paslon pada Pilkada Kabupaten Sleman dengan studi kasus di Desa Condongcatur.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui manfaat teoritis, penelitian ini seharusnya menjadi bahan *review* dan menjadi salah satu kontribusi pemikiran untuk sains secara keseluruhan dan ilmu sosial, dan menjadi bahan untuk spesialis masa depan yang terkait dengan peran media sosial instagram dalam memperluas dukungan politik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menciptakan konsekuensi yang lebih signifikan bagi para politisi dan partai politik dalam mengoptimalkan peran media sosial

instagram guna memperluas kampanye dan dukungan politik.

## 1.6 Literatur Review

Penelitian mengenai peran media sosial dalam kontestasi politik terus menjadi topik penelitian yang relevan. Hal ini seiring dengan perkembangan implementasi sistem demokrasi yang menghendaki proses pemilihan umum sebagai mekanisme pemberian mandat oleh rakyat kepada pimpinan pemerintahan dalam mengelola kehidupan publik. Penelitian mengenai penggunaan media sosial dalam proses pemilu telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dengan topik sejenis.

No.	Penulis (Tahun) dan Judul	Hasil
1	Amirul Hasan (2007) Judul: Pengaruh Media Terhadap Tingkat Partisipasi Politik (Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Ciputat Pada Pilkada Propinsi Banten Tahun 2006). Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Metode penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bersumber pada data-data matematis dan serangkaian observasi dan pengukuran yang dinyatakan dalam angka. Dari hasil penelitian tingkat penerimamasyarakat Ciputat terhadap media- media yang memuat informasi pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten tahun 2006 berada pada angka 23,6 atau sedang. Tingkat partisipapolitik masyarakat Ciputat pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten tahun 2006 berada pada angka 16,5 atau rendah. Adapun korelasi antara keduavariabel (media dan partisipasi

		<p>politik)berada pada angka 0,35, atau dengan katalain korelasi pada kedua variabel tersebut rendah. Adapun kontribusi media dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Ciputat Pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Banten tahun 2006 sebesar 12,2 %.</p>
2	<p>Achmad Furqon (2013) Judul: Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Secara Ekspresi Simbolik Di Media Sosial Jelang Pemilu 2014. Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Metode penelitian yang di gunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam tataran praktis. Berdasarkan hasil penelitian strategi iklankampanye politik PKS jika dilihat dariteori semiotik Sanders Pierce terdiri dariikon, indeks dan simbol. Namun jikadilihat dari isi strategi kreatif yang diekspresikan PKS melalui iklan kampanye politiknya, makaPKS melakukan tahapan tindakan seperti, komunikasi dengan masyarakat atau konstituen langsung dari rumah kerumahatau komunikasi door to door, lalu membuka simpul massa PKS mengajak pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu mengatasi Permasalahan yang ada ditengah</p>

		<p>masyarakat. Selanjutnya PKS berbicara kepada masyarakat dengan berdasarkan platform partai sebagai tindak lanjut dari PKS mengajak bekerjasama dengan masyarakat. Dan yang terakhir membuat simpati-simpatik masyarakat yang diharapkan membantu tercapainya target PKS dalam memenangi pemilu 2014. Ekspresi simbolik iklan PKS di mediasosial yaitu membuat grand strategy untuk membuat image, brand dan citra dimata khalayak dalam memperluas segmentasi pemilih dari semua lapisan kalangan masyarakat. Lalu menunggangi gelombang yang sedang banyak dibicarakan dan memanfaatkan momentum untuk mencapai target exposure yang diinginkan.</p>
--	--	--

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, penelitian ini merupakan replikasi dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada jenis media sosial yang digunakan yaitu instagram. Sedangkan studi kasus yang dianalisis adalah Pilkada Sleman tahun 2020 dengan subyek penelitian masyarakat Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang terpengaruhi oleh pemberitaan di instagram dalam menentukan pilihan politiknya pada pilkada tersebut.

## **1.7 Kerangka Dasar Teori**

### **1.7.1 Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik**

Media sosial adalah salah satu jenis korespondensi massal di era media baru. Media Baru adalah komunikasi luas berbasis digital atau lebih sering disebut media berbasis internet. Media sosial menjadi salah satu jenis alat komunikasi massa yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1996 (Asa, 2000). Sebelumnya, masyarakat hanya berfokus pada media massa dalam pandangan dunia lama seputar media tradisional seperti televisi, koran, majalah, tabloid, buku, radio, film, dan kaset (disc). Sementara itu, dalam pandangan dunia baru, media sosial berbasis internet adalah surat kabar, televisi, radio, majalah, dan internet (digital). Untuk alasan apa media sosial digunakan umum oleh korespondensi secara massal, sangat jelas premis kehadiran media sosial mengingat kemajuan internet dan digital. Jika dilihat dari makna media sosial adalah cara yang paling efektif untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat umum yang lebih luas (Littejohn & Foss, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial termasuk sebagai salah satu media komunikasi luas yang merupakan sumber data yang dapat diakses oleh banyak individu.

Media sosial tidak dapat dipisahkan dari perkembangan web di mana komunikasi luas berbasis online merupakan sumber data yang saat ini dapat diakses oleh banyak orang. Pada dasarnya media sosial adalah kemajuan terbaru dari inovasi pengembangan internet berbasis website terbaru, yang membuatnya lebih mudah untuk menyampaikan, menarik, dan bertukar informasi satu sama lain untuk membentuk jaringan berbasis internet, sehingga mereka dapat menyebarkan substansi mereka sendiri (Zarella, 2010). Demikian juga menurut Zarella (2010)



media sosial memiliki tujuan dimana individu berbicara dengan teman mereka dalam kenyataan dan internet. Sebagian besar orang saat ini lebih dekat dengan teman media sosialnya yang jauh daripada yang dekat karena interaksi di media sosial. Hal ini sangat sederhana, terutama untuk efektivitas waktu dan berguna dalam penyelesaian semua masalah komunikasi jarak jauh.

Manfaat media sosial terus berubah dalam jangka panjang sehingga tidak ketinggalan, selalu unik dan mengikuti tuntutan zaman dan penggunaannya, yaitu masyarakat pengguna media sosial (netizen) (Zerella, 2010). Pada awalnya, media sosial ditujukan untuk bertukar informasi dan menyampaikan dengan cepat dan tanpa gangguan. Namun, saat ini tidak sedikit media sosial yang telah berubah fungsinya, yang awalnya untuk tujuan bertukar informasi dengan teman-teman terdekat, namun saat ini batasan tersebut sudah tidak menjadi masalah seperti Facebook, Twitter dan Instagram yang memiliki peminat atau pengguna dengan jumlah yang sangat besar. Meskipun kebijakan di Facebook yaitu membatasi beberapa teman atau pengguna media sosial lainnya tidak lebih dari 100 orang, tetapi sekarang batasan itu hilang karena ada lebih banyak tuntutan dan keuntungan. Artinya, saat ini tidak hanya menjadi media penyedia informasi, namun ada kepentingan yang berbeda, khususnya bisnis, masalah legislatif dan lain-lain yang ada melalui media sosial (Raenaldy, Erviantono, & Bandiyah, 2017).

Misalnya, pada pertengahan 2014-2015, media sosial muncul sebagai sarana untuk bisnis online, mulai dari makanan, konveksi, buku, dan perangkat domestik lainnya. Praktis di semua media sosial ada orang-orang yang membuat akun untuk bisnis, misalnya di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan kekhasan ini, panggilan lain akhirnya muncul, khususnya dukungan, yang merupakan

kegiatan waktu terbatas yang diselesaikan dengan memposting rekaman atau melalui hiburan berbasis web, di mana minat untuk mempromosikan produk dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak perlu menjadi ahli. , namun setiap individu yang memiliki banyak pengikut dan memiliki kekuatan. sebagai ketua penilai. Maka tidak sedikit orang-orang konvensional sekarang ini yang berusaha untuk menambah peminat dengan cara yang berbeda, dengan tujuan agar mereka menjadi pusat perhatian dan memiliki banyak penggemar (Ahmad, 2012). Dari sekian banyak hiburan berbasis web, Instagram, yang tentu saja merupakan hiburan virtual paling luas untuk bisnis dan endorismnet, juga muncul di Instagram, kemudian muncul istilah lain untuk kekhasan ini, yaitu nama besar instagram atau superstar di mana seseorang merasa Seperti seorang perajin atau pekerja seni yang pada umumnya muncul atau terkenal di media TV, surat kabar atau majalah, namun ini adalah seseorang yang populer untuk memperkenalkan foto, rekaman, atau pertunjukan yang menarik sehingga menjadi terkenal (Budhijanto, 2010).

Ranah politik juga merupakan kekhasan lainnya, pendakian misi politik dan perbincangan tentang domain politik tersedia melalui media sosial. Sejak Pemilihan Presiden tahun 2014, misi politik dan diskusi politik semakin terlihat di Instagram, Twitter, dan Facebook. Banyak catatan yang sengaja memberikan konten yang memuat misi politik dan data politik dengan lebih mendalam (Nanda, 2018). Terakhir ada istilah *buzzer* pada media sosial, *buzzer* berasal dari bahasa Inggris yang artinya lonceng atau alarm. Istilah *buzzer* sering dicirikan sebagai perangkat yang digunakan untuk membuat pernyataan atau melaporkan sesuatu informasi untuk menarik dan mengumpulkan individu. Berkenaan dengan media sosial, *buzzer* ini mencoba untuk membuat banyak situasi eksplisit dengan unggahan di

media sosial seperti yang akan bijaksana sepenuhnya bermaksud membuat publik memiliki beberapa keakraban dengannya dengan cepat atau juga sebagai kemajuan suatu produk atau tokoh politik, biasanya sinyal sebagai sebuah pesta yang melemparkan suatu isu ke dalam media (Raenaldy, Erviantono, dan Bandiyah, 2017). Kebangkitan sinyal di Indonesia ditandai dengan misi liar melalui hiburan virtual selama keputusan politik gubernur DKI Jakarta 2012 dan pemilu 2014. Keanehan ini juga terekam dalam film layar lebar Indonesia, Republik Twitter, yang ditayangkan di Indonesia pada 16 Februari 2012. Film ini menceritakan bagaimana siklus dasar menyelesaikan latihan waktu yang terbatas. Masalah pemerintahan oleh calon kepala daerah yang perlu mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dengan menggerakkan diri melalui twitter web-based entertainment dengan substansi positif dan negatif untuk diketahui oleh masyarakat luas, dan ini bisa dikatakan sebagai acara kelompok klandestin yang telah diatur dan dipandang sebagai bisnis (Fadly, 2015).

Twitter dan Instagram adalah media sosial yang digunakan secara luas untuk kampanye meskipun komunikasi umum lainnya seperti TV melalui iklan, berita, dan buletin. Sasaran anak muda menjadi tujuan dari cara berperilaku politik ini, terlihat dari konsekuensi review oleh *Talylor Nelson Sofres* (TNS) Indonesia yang mengungkapkan bahwa anak muda (18-24 tahun) menguasai pengguna Instagram di Indonesia dengan level 59 %, sedangkan peringkat kedua berasal dari kelompok usia 25-34 tahun. Pengguna media sosial umumnya digunakan oleh anak muda dengan tujuan agar cara politik menghadapi warga pemula dan era milenial menjadi lebih lugas karena adanya media sosial (Nurgiansah, 2021).

Media sosial penting sebagai alat yang berhasil dalam proses korespondensi

politik, terutama yang berkaitan dengan ras politik yang dapat menjadi perantara legislator dan konstituennya, khususnya antara komunikator dan komunikan dari jarak jauh. The Consise Reference book Correspondence (2015) menggarisbawahi bahwa; Korespondensi politik adalah setiap penyampaian pesan yang sengaja diselenggarakan untuk memperoleh dampak peredaran atau penggunaan kekuatan di mata publik yang berisi empat jenis korespondensi, untuk lebih spesifik (a) *elite communication*, (b) *a haegemonic communication*, (c ) komunikasi Petisi, (d) komunikasi asosiasi. Media sosial merupakan jenis saluran korespondensi untuk politisi dengan pendukung mereka. Jenis komunikasi yang diselesaikan adalah dengan membangun penilaian populer dan sekaligus mengumpulkan bantuan politik yang besar. Penggunaan media sosial juga telah memperluas organisasi korespondensi politik, hubungan politik, dan dukungan publik dalam perlombaan.

Media sosial juga digambarkan sebagai sarana dan basis data yang ideal untuk mengetahui penilaian populer tentang strategi dan situasi politik, serta membangun dukungan daerah bagi legislator yang sedang berjuang. Berbagai ujian di seluruh dunia telah dilakukan melalui media sosial untuk membangun asosiasi dengan konstituen, memiliki wacana langsung dengan masyarakat umum dan membentuk percakapan politik, kemampuan untuk membuat ruang untuk pertukaran antara legislator dan masyarakat umum serta menarik warga muda. /pemilih muda membuat media sosial semakin signifikan bagi pejabat pemerintah (Stieglitz dan Darn Xuan, 2012).

Kampanye melalui media sosial mulai banyak dimanfaatkan pada Pilkada DKI Jakarta 2015, dimana pendukung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memanfaatkan Youtube untuk memposting rekaman visi misi mereka, bahkan ada

game internet yang dibuat unik dengan permainan simbol seperti Jokowi. (Raenaldy, Erviantono, & Bandiyah, 2017). Media sosial adalah hutan belantara, dan pada dasarnya tidak ada pedoman di dalamnya (Blackwell, 2015). Dengan hadirnya hiburan virtual, penghibur politik juga harus memahami bahwa terlepas dari kenyataan bahwa mereka benar-benar sebagai otoritas yang memiliki posisi tinggi atau kelompok ideologis yang berkuasa, situasi mereka melalui hiburan berbasis web adalah standar dengan klien yang berbeda. Inilah awal dari siksaan, dan fitnah terhadap legislator dan pemerintah di suatu negara. Seperti yang terjadi dalam misi dan balapan melalui hiburan berbasis web di mana moral dan staf publikasi dalam upaya menyuarakan umumnya tidak dipikirkan. Semua dalam melihat hal-hal yang sifatnya negatif bertekad untuk memimpin penilaian massa untuk lebih terprovokasi oleh keadaan.

### **1.7.2 Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Budiarjo (2013), dari prespektif politik dan pemerintahan, penyelenggaraan pilkada memang memberi ruang bernafas yang lebih longgar bagi partisipasi otonomi masyarakat. Pilkada langsung yang semestinya memiliki makna mendalam dan amat berarti dapat menjadi ajang penguatan *civil society* karena

menentukan kepala daerah tidak lagi menjadi urusan dominan aktor tunggal yang dalam hal ini adalah politik dan lembaga leigslatif. Menurut Budiardjo (2013) menjelaskan bahwa kualitas pilkada langsung akan berjalan dengan baik antara lain:

- a) Iklim demokrasi harus dimulai dari partai politik terutama yang memenuhi ketentuan prundang-undangan dalam proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan calon kepala daerah. Dengan kata lain. Partai politik harus memiliki sistem dan mekanisme perekrutn calon kepala daerah yang demokratis.
- b) Peraturan perundang-undangan yang dibuat benar-benar mencerminkan demokratisasi itu sendiri dan tidak anarki.
- c) Sistem dan mekanisme kerja masing-masing lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada tidak tumpang tindih dalam peran dan fungsinya.
- d) Pemerintah harus benar-benar independen dan tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun.
- e) Kedewasaan dan kematangan politik masyarakat senantiasa ditumbuh kembangkan, melalui pendidikan politik.

Menurut Labolo & Teguh (2015) pilkada langsung merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di indonesia, sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi sebagai wacana dan retorika elit daerah, sebagaimana selama ini terjadi. Menurut Labolo & Teguh (2015), pilkada langsung merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di indonesia, sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi sebagai wacana dan retorika elit daerah, sebagaimana selama ini terjadi. Ada beberapa faktor

pendorong pilkada langsung yaitu:

1) Sistem pemilihan diwanai banyak kasus

Pilkada melalui perwakilan DPRD selama ini memanfaatkan *money politic* untuk memenuhi kepentingan masing-masing, hal ini yang membuat nanti ketika memimpin masalah yang ada ialah terkait akuntabilitas pemerintahan daerah yang buruk.

2) Rakyat dapat berperan langsung

Sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dapat pada pemiliknya sendiri, dengan begitu manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politisi dan anggota DPRD dapat dihindarkan.

3) Peluang terjadinya politik uang akan semakin menipis

Politik uang akan tidak efektif seiring pelaksanaan pemilihan langsung karena calon pemberi uang tidak akan mampu mengontrol dengan mudah. Apalagi mekanisme pengawasan pilkada dilakukan secara ketat oleh pengawas. Masyarakat bisa bersaksi bila terjadi politik uang.

4) Peluang campur tangan partai politik berkurang

Campur tangan partai politik merupakan tindakan anti demokrasi karena berarti ada rekayasa, karena masyarakat akan menganggap hanya memilih calon-calon yang dikenal dan memahami daerahnya.

5) Hasil yang lebih objektif

Siapaun yang dipilih dialah yang memang, hasil objektif inilah yang tidak selalu identik dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kapasitas

dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. Namun hal tersebut harus dipahami dan dipelajari sebagai sistem demokrasi.

Asas-asas yang berlaku dalam penyelenggaraan pilkada langsung sama dengan asas-asas yang berlaku dalam pemilu. Asas pilkada merupakan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pilkada serta sebagai sarana agar pilkada terlaksana dengan demokrasi. Pilkada langsung harus diakui sebagai peluang dari banyaknya partisipasi politik memberikan ruang untuk masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya (Hadiwijoyo, 2012). Tidak saja menyuarakan tetapi masyarakat juga mengontrol kepala daerah untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat karena ketika pilkada langsung maka masyarakat lah yang memberi mandat langsung kepada pemimpin daerah.

### **1.8 Definisi Konseptual**

Media adalah alat yang digunakan untuk saling mengirimkan pesan dan informasi dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima). Media komunikasi dapat berupa saluran relasional, media kelompok dan ada pula yang bersifat komunikasi massa. Jenis media yang dapat dirujuk antara lain media cetak, media elektronik, lembaran elektronik, komunikasi kelompok, dan saluran komunikasi massa (Ahmad, 2012). Korespondensi adalah rangkaian hubungan sosial yang digunakan individu untuk membangun implikasi yang terdiri dari gambaran mereka tentang dunia (di mana mereka bertindak) dan untuk memperdagangkan gambar-gambar itu melalui gambar (Ahmad, 2012).

Seperti yang ditunjukkan oleh Lucian Pye (Chilcote, 2007), komunikasi adalah jaringan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat. Rancangan kerangka



komunikasi dengan saluran-salurannya yang cukup jelas menyerupai struktur sosial yang dibangun atasnya. Substansi komunikasi adalah sumber substansi esensial dalam hubungan manusia. Perkembangan komunikasi menentukan arah dan petunjuk dari pergantian peristiwa sosial yang dinamis. Pye merekomendasikan bahwa komunikasi memberikan sistem hubungan kekuatan yang terorganisir secara rutin dan keteraturan dan kesepakatan politik massa di mata publik.

Pada saat perubahan zaman yang membuat masyarakat saat ini semakin kekinian, dan kemajuan-kemajuan inovatif muncul media baru yang dikenal sebagai media interaktif melalui komputer dan perangkat elektronik dalam genggamannya yang dalam banyak hal juga disebut website (*Global Networks*). Internet benar-benar merupakan konsolidasi dari komputer, telepon, dan TV. Apa yang dibuat oleh internet sangat khusus, terutama masyarakat umum yang dibentuk oleh jaringan komputer dan internet, yang dikenal sebagai masyarakat virtual (*virtual space*) (Budhijanto, 2010).

Dengan dukungan media baru internet, penerbitan perangkat khusus yang semakin canggih dan hampir semua orang memiliki perangkat khusus seperti ponsel dengan model layar yang berbeda dan menikmati manfaat. Masyarakat saat ini sangat suka berdiskusi dan membaca data melalui media sosial, mengingat fakta bahwa banyak informasi dalam seperseki detik segar dan dapat langsung menawarkan sudut pandang dan mendapatkan reaksi langsung, kontras dengan membaca berita melalui surat kabar (Fadly, 2015).

Media sosial yang luas dan sering digunakan oleh individu dari anak-anak hingga orang dewasa adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu wadah komunikasi interpersonal jarak jauh yang awalnya untuk kerjasama sosial atau

penyampaian data tentang media sosial, namun lambat laun berubah menjadi virtual local area (virtual local area). Meskipun demikian, tindakan komunikasi informal jarak jauh ini sangat bergantung pada kesederhanaan akses web. Saat ini, Indonesia menempati urutan kedua terbesar pengguna Instagram, yakni 63 juta klien. Keistimewaan Instagram adalah memberikan fitur yang dapat diakses oleh setiap individu yang merupakan pengguna dari (Hootsuite, 2020).

Dalam media sosial, partisipasi politik berkembang sangat luas. Masyarakat umum bukan hanya orang-orang yang tidak terlibat, tetapi juga sering menyampaikan pesan-pesan politik. Memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan sudut pandang dan mentalitas. Meningkatkan soliditas melalui petisi, dukungan melalui media sosial hingga pembuatan rencana media sosial yang dapat berdampak pada rencana media biasa menjadi rencana politik (Nurgiansah, 2021). Kampanye politik, analisis, penggalangan dukungan hingga pertarungan opini di Instagram dan Twitter serta media sosial lainnya sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan dukungan dari era internet telah mendorong serangan di internet negara lain, peretasan, pembobolan, atau *phishing*.

Kepentingan politik dicirikan sebagai latihan residen yang berarti memengaruhi pengaturan politik, latihan residen, termasuk memberikan suara, menandai petisi, atau pameran kesimpulan jalan. Kepentingan politik mencakup penduduk yang dikecualikan sebagai legislator atau otoritas pemerintah termasuk pegawai pemerintah. Tindakan yang disebut sebagai kerja sama politik tidak termasuk menonton program diskusi politik di TV atau hanya tertarik pada isu-isu legislatif. Gerakan mengandung makna perilaku luar yang ditunjukkan oleh warga melalui pemungutan suara, petisi, dan lain-lain (Tangkas, Muntaha, dan

Supadiyanto, 2022).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya (Nurgiansah, 2021). Dengan kata lain keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sangat diperlukan.

Secara teoritis, dalam teori *Activist Rationality*, partisipasi politik di suatu negara akan menentukan kualitas demokratis pemerintahan di negara tersebut. Demokrasi tidak akan bekerja tanpa peran atau gerakan yang dilakukan oleh warga dalam partisipasi dan dukungan politik. Semakin efektif warga mengambil bagian dalam partisipasi politik, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan di negara tersebut (Hadiwijoyo, 2012). Menurut Herbert Mc. Closky (dalam Budiardjo, 2013), partisipasi politik adalah aktivitas yang disengaja dari warga di mana mereka mengambil bagian selama waktu yang disediakan untuk memilih pejabat pemerintah dan secara langsung atau dengan implikasi, selama waktu yang disediakan untuk kampanye politik dalam suatu proses pemilihan umum. Dibandingkan dengan negara-negara baru, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2013) menyebutkan *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberikan terjemahan yang lebih luas dengan secara tegas memasukkan demonstrasi dan kekejaman yang melanggar hukum. Partisipasi politik adalah tindakan penduduk yang berjalan sebagai

manusia, yang direncanakan untuk mempengaruhi navigasi pemerintah. Kepentingan dapat berupa individu atau kelompok, terkoordinasi atau tidak dibatasi, konsisten atau tidak konsisten, tenang atau biadab, sah atau melanggar hukum, memaksa atau tidak mampu.

Partisipasi politik benar-benar ide yang terkenal dalam Teori Politik. Namun pemanfaatannya sering berubah-ubah, sehingga menimbulkan berbagai pemahaman tentang ide tersebut. Semua hal dipertimbangkan, sebagian besar peneliti politik setuju bahwa apa yang tersirat dari kerja sama politik adalah cara di mana wilayah lokal atau mayoritas dikaitkan dengan latihan politik. Alasan dari latihan politik ini adalah untuk mempengaruhi cara paling umum dalam perencanaan dan pelaksanaan pendekatan pemerintah (Utomo, 2013).

## **1.9 Definisi Operasional**

### **1.9.1 Peran Media Sosial Terhadap Pemenangan Calon Bupati**

Media sosial bersifat digital, dimana pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafik, diagram, foto, teks, gambar gerak (video) yang diproses dan disimpan dalam bentuk angka dan menjadi output dalam bentuk online, disk digital, atau memori drive yang diterjemahkan dan diterima sebagai tampilan layar dan dikirim kembali melalui jaringan telekomunikasi (Lister, 2009:11). Effendy (2000: 84) menyatakan bahwa ada beberapa alasan pememuhan seseorang yang ingin dipenuhi dalam menggunakan media sosial, salah satunya adalah kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif (Cognitive needs), yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan informasi, pengetahuan dan pemahaman. Kebutuhan ini didasarkan pada dorongan- dorongan untuk memahami dan menguasai lingkungan,

juga memuaskan rasa penasaran.

*Gambar 1.5 Instagram*



Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata —instal berasal dari kata —instanl, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan —foto instanl. Welcome to instagram. Inilah kalimat pembuka yang diucapkan Kevin Systrom dan Mike Krieger di blog resminya pada 6 Oktober 2010, menandai lahirnya aplikasi photo sharing revolusioner instagram Seiring berjalannya waktu, Instagram telah menjadi layanan photo sharing yang handal dengan segudang prestasi dan jutaan pengguna. Kesuksesan platfrom iOS telah berhasil diraih. Kevin berfikir sudah waktunya untuk melebarkan sayapnya ke platfrom lain. Platfrom yang menarik perhatiannya setelah iOS adalah Android. Kevin pun mengumumkan di media massa mengenai ketertarikannya pada Android dan mencari programmer (Atmoko, 2012).

Menurut Nursal, political marketing ialah serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sementara itu, hal yang ditekankan dalam strategi political marketing adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus ataupun partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat

(Andrias & Nurohman, 2013).

Peran media sosial instagram dalam pemenangan calon dapat dianalisis melalui akun instagram para calon bupati, yaitu antara lain:

- a. Jumlah pengikut cabup berperan sebagai dukungan atas seluruh unggahan dan interaksi cabup dengan audiens yaitu pengikutnya. Maka dari itu, semakin banyak jumlah pengikut instagram calon bupati menjadi faktor penunjang kampanye di media sosial. Selain itu, jumlah pengikut memungkinkan cabup untuk menyebarkan informasi kampanyenya kepada teman para pengikut di instagram.
- b. Jumlah unggahan cabup mengindikasikan adanya upaya komunikasi dan kampanye politik yang terstruktur dan masif. Cabup dengan jumlah unggahan yang lebih banyak berpeluang untuk muncul di beranda dan eksplorasi instagram para pengikutnya juga teman atau kaitan para pengikutnya. Oleh karenanya, jumlah unggahan dapat mempengaruhi kemenangan cabup dalam kontestasi pilkada.
- c. Jenis unggahan berkenaan dengan bentuk unggahan di instagram para cabup yaitu video atau foto (gambar). Jenis unggahan mempengaruhi para pengikut untuk melakukan tindakan politik dalam pilkada.
- d. Topik dan isu yang diangkat relevan dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan masyarakat akan mempermudah masyarakat menentukan pilihan politiknya. Topik dan isu yang relevan dengan preferensi masyarakat akan meningkatkan peluang cabup dalam memenangkan pilkada.

### 1.9.2 Rerspon Masyarakat Terhadap Kampanye di Instagram Cabup

Dari unggahan instagram cabup, masyarakat merespon dengan berbagai bentuk. Analisis respon masyarakat ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau bagian, antara lain:

- a. Respon disukai (*like*) di instagram cabup oleh para pengikut maupun masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa unggahan cabup direspon positif oleh masyarakat. Semakin banyak disukai (*like*) unggahan para cabup maka semakin besar pula dukungan dan peluang kemenangan cabup pada pilkada.
- b. Respon komentar di instagram cabup merupakan aktivitas masyarakat terutama pengikut instagram cabup dalam merespon unggahan secara aktif. Berbeda dengan disukai (*like*), komentar merupakan suatu respon aktif dari pengikut di instagram terhadap unggahan cabup baik dukungan maupun kritik.
- c. Preferensi masyarakat pemilih terhadap isu yang diangkat oleh cabup berperan penting menarik minat baca pengguna instagram. Cabup yang mampu menangkap isu yang paling diminati masyarakat akan memiliki keunggulan terhadap yang lain. Ini dianalisis dengan menginterview masyarakat tentang ketertarikannya terhadap isu tertentu sehingga dapat dicocokkan relevansinya dengan unggahan instagram para cabup.
- d. Kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap cabup dianalisis menggunakan interview langsung yaitu dengan meminta keterangan masyarakat pemilih tentang kebutuhan dan harapan terhadap visi, misi, dan program para cabup. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang

dipenuhi oleh unggahan informasi dari cabup dapat meningkatkan potensi kemenangan pada pilkada.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu metode untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Data yang diperoleh berupa data sistematis, faktual, dan akurat, serta menunjukkan data yang otentik (Abdurrahman, 2003). Jenis penelitian ini terlihat ingin menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah secara holistic guna membangun teori (Hanafi, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data deskriptif kualitatif dari narasumber (pemilih Pilkada Sleman tahun 2020) terkait penelitian peran instagram dalam pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Sleman.

### **1.10.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

#### a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada masyarakat Desa



Condongcatur.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitiandalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang- undangan.

### **1.10.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dalam penelitian ini (Abdurrahman, 2003). Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Condongcatur yang terdaftar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman. Adapun responden merupakan masyarakat Desa Condongcatur sebanyak 5 hingga 10 orang untuk menggali informasi yang cukup. Sedangkan kriteria penentuan responden adalah sebagai berikut:

- 1) Tercatat sebagai pemilih pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020.
- 2) Aktif memberikan suara pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020.
- 3) Memiliki instagram dengan intensitas penggunaan instagram setiap hari.

4) Merupakan pengikut (follower) seluruh atau salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020.

b) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan (Hanafi, 2011). Penulis melakukan pengamatan terhadap jenis media sosial yang berupa Instagram yang memberikan informasi Pilkada dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman tahun 2020.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode atau cara untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Abdurrahman, 2003). Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen KPUD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020.

#### **1.10.4 Metode Analisis Data**

Setelah memperoleh data penelitian, data dianalisis dalam beberapa tahap

(Sugiyono, 2007):

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksitas data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b) Penyajian data

Tahap berikutnya dari teknik analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan menuliskan atau menunjukkan sekumpulan data yang telah disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data dan penyajian data. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari

makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

d) Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian telah memenuhi kaidah ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Di samping itu, pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007).

### **1.11 Kerangka Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data kualitatif deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan kolaborasi atas data kampanye dari instagram untuk menentukan keterkaitan komunikasi politik di instagram dengan tingkat penerimaan informasi dan penentuan pilihan oleh masyarakat terhadap pasangan calon.

**Gambar 1.6 Kerangka Penelitian**

